



INTISARI

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk menarik masuknya investasi ke daerah tersebut. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Belitung yang melakukannya dengan menarik masuknya investasi perkebunan kelapa sawit. Pembukaan dan keberadaan perkebunan kelapa sawit sebelum tahun 2004 tidak pernah menimbulkan konflik di tengah masyarakat di Kabupaten Belitung. Namun ketika PT. Agro Makmur Abadi (PT. AMA) membuka perkebunan kelapa sawit tahun 2004 terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Air Seru, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik horizontal dan konflik vertikal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap pelaksanaan tata ruang dalam kaitannya dengan pembukaan dan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan dengan metode induktif kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Peneliti merupakan instrumen utama penelitian untuk mengumpulkan data dengan metode wawancara mendalam. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan membandingkan terhadap dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Air Seru, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan unit pengamatan juga dilakukan di Desa Air Selumar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Air Seru dipengaruhi oleh tema-tema antara lain : (1) tema gagalnya sosialisasi, (2) tema pelaksanaan prosedur, (3) penolakan masyarakat, (4) masyarakat memihak perkebunan kelapa sawit dan (5) lapangan pekerjaan. Selanjutnya dari konflik yang terjadi di masyarakat peneliti menemukan bahwa keragaman konflik yang terjadi yaitu konflik lahan dan pelaku konflik. Konflik lahan meliputi: (1) konflik penguasaan lahan (*land tenurial*) yang melibatkan konflik antara PT. AMA dengan masyarakat Desa Air Seru dan Desa Air Selumar serta konflik PT. AMA dengan PT. Timah, (2) konflik penggunaan lahan (*land use*) yang melibatkan konflik antara PT. AMA dengan PT. Tirta Marundang Indah. Pelaku konflik meliputi: (1) konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan (2) konflik antara kelompok masyarakat pro dan kontra. Dari tema-tema yang ditemukan dan keragaman konflik terjadi maka peneliti menemukan bahwa pembukaan perkebunan kelapa sawit PT. AMA telah menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal terjadi antara kelompok masyarakat pro dan masyarakat kontra, konflik antara PT. AMA dengan PT. Timah dan PT. Tirta Marundang Indah yang dipengaruhi oleh tema pelaksanaan prosedur, penolakan masyarakat, masyarakat memihak perkebunan kelapa sawit dan lapangan pekerjaan. Sedangkan konflik horizontal yang terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan PT. AMA yang dipengaruhi oleh tema gagalnya sosialisasi, pelaksanaan prosedur, penolakan masyarakat, dan lapangan pekerjaan. Dari hasil pengumpulan data empiris di lapangan konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat disebabkan oleh adanya skenario konflik. Skenario yang dilakukan yaitu: (1) skenario penguasaan lahan oleh PT. AMA; (2) skenario pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten Belitung; (3) skenario mempertahankan keberadaan PT. AMA oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Akar permasalahan konflik yang terjadi di tengah masyarakat adanya pelanggaran tata ruang, gagalnya sosialisasi dan pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan prosedur.

Kata kunci : konflik horizontal, konflik vertikal, perkebunan besar kelapa sawit, tata ruang.



ABSTRACT

Since the Act of Number 22/1999 about Regional Autonomy put into effect, the regional governments are eager to open chances to invest in their regions. This case is also occurs in Belitung Regency which open opportunity to invest in palm plantation. Before 2004, the exploitation and the existence of palm plantation have never triggered conflict among people around Belitung Regency. However, after PT. Agro Makmur Abadi (AMA) begun to exists in the area, the conflict started to arouse primarily in the society of Air Seru Village, Sijuk Sub district, Belitung Regency.

The research aims to describe the horizontal and vertical conflicts occurred among society in relation to space organization due to the existing palm plantation. It is conducted in qualitative-inductive method using phenomenological perspective. The researcher is the main instrument of the research to collect data by in-depth interview method. The validity of the data was examined by triangulation technique which compared documents collected. The locus of the research is Air Seru Village, Sijuk Sub District, Belitung Regency with examination unit taken place in Air Selumar Village.

The research results show that the conflict occurred in Air Seru Village influenced by such themes: (1) the failure of socialization, (2) the implementation of the procedure, (3) the refusal of people, (4) the people sides with the palm plantation and (5) field of job. From the conflicts taken place in the society, the researcher found that the diversity of the conflicts are land conflict and actors of conflict. Land conflicts included: (1) conflict of land tenure, which involved PT. AMA with Air Seru villagers and Air Selumar Villagers, and the conflict between PT. AMA and PT. TIMAH, (2) land use conflict between PT. AMA and PT. Tirta Marundang Indah. The actors of the conflict are (1) the society and the government and (2) between the pro and the contra society. From the themes findings and the diversity of the conflict, the researcher concluded that the pioneering of palm plantation by PT. AMA caused horizontal and vertical conflict. The horizontal conflict happened between the pro and the contra sides, the conflict between PT. AMA with PT. Timah and PT. Tirta Marundang Indah which is determined by the procedural implementation, people refusal, people sides with the palm plantation, and field of job. On the other hand, the vertical conflict took place happened between society and the government and PT. AMA which is influenced by the failure of socialization, procedural implementation, people refusal and field of job. From the empirical data collected, it is identified that the conflict happened among people caused by scenario conflict. The scenario formulated are; (1) the land exploitation scenario by PT. AMA, (2) delivering permit scenario by Belitung Regency, and (3), Securing the existence of PT. AMA by Belitung Regency. The roots of the conflict problems are the infraction of space organization; the failure of socialization and the last, the plantation disobeyed their obligations procedurally.

Keywords: Horizontal Conflict, Vertical Conflict, Palm Plantation, Space Organization



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Konflik tata ruang di sekitar perkebunan besar kepala sawit :: Studi kasus di Kabupaten Belitung
PANGARIBUAN, Holmes Ronald Surya, Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

